



Gaduh PBI JKN Nonaktif, Komisi D 'Pasang Badan' Untuk Warga Terdampak



YOGYA (KR) - Memasuki awal Februari terjadi kegaduhan hampir di seluruh daerah, termasuk Kota Yogya. Ini berkaitan dengan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta pun langsung 'pasang badan' bagi warga terdampak.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Darini, menyebut penonaktifan JKN PBI yang secara tiba-tiba menimbulkan gejolak di masyarakat. Terutama warga yang hendak mengakses layanan kesehatan di rumah sakit namun kaget lantaran status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Akibatnya, akses masyarakat menjadi terganggu padahal kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. "Ini kan seperti tidak ada informasi sebelumnya. Akhirnya masyarakat yang membutuhkan layanan menjadi terdampak. Kondisi seperti ini jangan sampai terulang," tandasnya.

Darini yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta ini pun menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius. Dirinya bersama jajaran Komisi D yang membidangi urusan kesehatan lantas mengundang para pihak terkait guna menindaklanjuti keresahan di masyarakat. Pihak terkait



KR-Ardhi Wahdan

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Darini memimpin rapat koordinasi bahas JKN PBI.

yang diundang dalam rapat pembahasan antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS Kesehatan, seluruh Kepala puskesmas hingga para pengelola rumah sakit baik swasta maupun pemerintah. Koordinasi yang melibatkan berbagai pihak ini pun menjadi wadah krusial lantaran disepakati tidak ada warga yang tertolak dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Penonaktifan JKN PBI yang dilakukan oleh pemerintah pusat seiring dengan penyesuaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Terdapat sekitar 21.000 peserta JKN PBI di Kota Yogyakarta yang statusnya menjadi tidak aktif per 1 Februari 2026 lalu. Atas persoalan tersebut, Darini juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan yang bertindak cepat dalam mengalihkan kepesertaan BPJS Kesehatan agar masuk dalam program Penduduk yang Dibiayai Peme-

rimannya.

Kendati demikian, seiring banyaknya kepesertaan JKN PBI yang nonaktif maka antrian layanan di Jamkesda Kota Yogya pun membludak. Otomatis kepesertaan program PDPD juga ikut melonjak hingga anggaran yang dibutuhkan pun dipastikan meningkat. Sehingga dirinya berharap layanan untuk pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bisa diperluas supaya seluruh penduduk Kota Yogya mampu terkover sepenuhnya.

Oleh karena itu, berka pada kegaduhan penonaktifan JKN PBI tersebut Komisi D membuat sistem atau skema mitigasi di tingkat daerah. Terutama dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pihak BPJS Kesehatan, OPD di lingkungan Pemkot serta pihak pengelola rumah sakit. "Kami di Komisi D yang akan menjembatani ketika sewaktu-waktu terjadi persoalan

Di samping itu, meski jumlah kepesertaan PDPD meningkat namun bagi

yang memenuhi kriteria untuk menjadi langganan pemerintah pusat, Darini juga mendesak untuk segera diusulkan kembali oleh Dinas Kesehatan melalui Dinsosnakertrans. Pasalnya, JKN PBI merupakan usulan dari Kementerian Sosial. "Alhamdulillah laporan dari Dinas Kesehatan saat ini sudah ada 4.829 peserta yang diajukan ke JKN PBI. Jumlah itu tentu nanti akan berkembang sesuai dengan hasil pendataan di daerah," urainya.

Terkait kebutuhan anggaran, Komisi D imbu Darini, tidak perlu dikhawatirkan. Jajarannya siap pasang badan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Sehingga ketika eksekutif mengajukan tambahan anggaran, maka pihaknya tentu akan seiring sejalan.

Di samping itu, meski jumlah kepesertaan PDPD meningkat namun bagi

seperti ini. Respon pihak rumah sakit juga sangat bagus dan memastikan aspek pertolongan pertama menjadi prioritas. Hasil pertemuan kemarin memastikan bahwa tidak ada pasien yang ditolak, dan proses pengaktifan kembali akan terus diakselerasi," paparnya.

Hingga saat ini, Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan Kota Yogya berhasil mengaktifkan 2.799 KK atau 5.483 jiwa. Koordinasi kedua instansi tersebut juga terus dilakukan dalam mempercepat proses pengaktifan kembali. Dinas Kesehatan selain melayani masyarakat melalui Jamkesda di kompleks MPP Kota Yogya juga menerima pengajuan lewat JSS dan WA. Sedangkan BPJS Kesehatan Kota Yogya membuka layanan informasi melalui WA di 08118165165 dan aplikasi JKN untuk mengecek status kepesertaan. (Dhi)



KR-Ardhi Wahdan

Instansi terkait menghadiri rapat kerja dengan Komisi D DPRD Kota Yogya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005